

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dan bagian pembangunan nasional. Menurut Dr. Zakiah Darajad generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun.<sup>1</sup> Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Dalam bagian kesepuluh Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan beberapa Hak Asasi anak yang dijamin oleh Undang-undang seperti hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya.

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, S.H. Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2000 hlmn 1.

Anak pada masa pertumbuhannya memiliki sifat suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan memiliki emosi yang sangat tajam.<sup>2</sup> Seorang anak yang beranjak dari masa kanak-kanaknya menjadi masa remaja mengalami perubahan yang sangat cepat dari segala bidang, baik perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Di masa remaja anak akan sering mengalami goncangan karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang sering dinilai sebagai perbuatan nakal.

Perlunya dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua maupun lingkungan keluarga untuk mencegah terjadinya kenakalan-kenakalan yang dilakukan anak. Keluarga sebagai bagian yang sangat penting dari anak, dimana keluarga merupakan tempat untuk membentuk pribadi anak sejak kecil. Disamping pembinaan di dalam keluarga perlu juga adanya pembinaan diluar keluarga. Sekolah, sanggar kesenian, tempat keterampilan dan tempat-tempat lainnya juga dapat menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap anak. Dari hasil penelitian Dr. Zakiah Darajad tentang anak remaja, beliau mengemukakan bahwa sebenarnya sekolah dan orang-orang pemerintahan dapat memenuhi kebutuhan umum dari remaja yang akan membantu menyelesaikan persoalan mereka guna menjaga jangan sampai remaja yang akan datang mengalami problema-problema pula.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid. hlmn 1.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, S.H. Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2000 hlmn 3.

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana.<sup>4</sup> Kenakalan remaja yang merupakan kenakalan biasa adalah seperti bermain gitar dan bernyanyi ramai-ramai di pinggir jalan hingga tengah malam, mencoret-coret tembok orang dan ngebut dengan kendaraan di jalan. Kenakalan remaja yang merupakan tindak pidana adalah seperti mencabuli teman sekolah, berkelahi dengan siswa sekolah lain, dan mencuri.

Seiring dengan perkembangan jaman, karena seringnya terjadi kenakalan-kenakalan remaja yang merupakan tindak pidana, pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya Undang-undang ini adalah karena generasi muda merupakan sumber daya manusia yang dapat menjadi potensi dan penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh dan seimbang. Perlunya dilakukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum untuk menjamin kesejahteraan anak.

Semakin maraknya terjadi kenakalan remaja di Indonesia, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak. Dibentuknya Undang-undang Pengadilan Anak

---

<sup>4</sup> Ibid. hlmn 4.

dan Perlindungan Anak bertujuan untuk melakukan sebuah penanganan terhadap perkara anak yang terlibat tindak pidana anak dengan cara memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak yang terkena kasus tidak dirugikan secara fisik dan mental.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi sosial, dan faktor psikologi anak. Faktor lingkungan keluarga merupakan kunci atau dasar dari perkembangan jiwa dan kepribadian si anak. Berkembangnya pembangunan yang cepat, arus globalisasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua dalam kehidupan bermasyarakat dapat sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak.

Seringnya anak meniru apa yang dilakukan oleh orang lain disekitar lingkungannya berakibat anak juga meniru hal-hal buruk yang dilakukan orang di lingkungan sekitar. Salah satu hal buruk yang dilakukan oleh anak karena mencotok tindakan yang dilakukan oleh orang di lingkungan sekitarnya adalah selorang anak melakukan pencabulan terhadap saudara sepupunya. Dedek Okta Gerhana adalah salah satu anak remaja yang melakukan pencabulan terhadap sepupunya sendiri yang bernama Elsa Indah Sanjaya.

Maraknya film-film porno atau blue film, video porno yang dapat diunggah melaui jejaring internet, handphone, dan majalah porno yang

banyak beredar di kalangan pelajar merupakan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan pencabulan. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menonton film porno, menggunggah video porno, membaca majalah-majalah porno bukan hanya orang dewasa saja tetapi anak yang duduk di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan bahkan anak yang masih kecilpun dapat melihat video porno dan membaca majalah-majalah porno tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama Pasal 287 secara lugas merumuskan; bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lam tujuh tahun.

Ke-1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Ke-2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Ke-3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak juga diatur dalam Pasal 81 ayat(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana paling lama 15 tahun, dan paling singkat 3 tahun, denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000.

Dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juga disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 dan paling sedikit Rp 60.000.000.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut masalah tentang “ Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Anak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang faktor yang mempengaruhi anak melakukan pencabulan
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh anak.
3. Untuk mengetahui sejauh mana hakim mempertimbangkan putusan tersebut agar tidak menjadi nestapa terhadap anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti

Penelitian hukum ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti tentang Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Anak.

2. Bagi pengadilan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam membuat putusan terkait tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana..

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini benar-benar disusun oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian orang lain. Penelitian tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan studi putusan hakim sejauh yang penulis ketahui belum ada yang membahas mengenai topik ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan anak namun berbeda dengan substansi yang dibahas yaitu ;

1. Judul Skripsi : Tinjauan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Judul ini ditulis oleh Ary Anggara Caryadwipa, mahasiswa angkatan 2007 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, penulis menggali lebih jauh mengenai apakah penjatuan pidana penjara terhadap anak merupakan sesuatu sanksi yang tepat. Tujuan penelitian yang disampaikan penulis yaitu untuk mengetahui apakah penjatuan sanksi pidana penjara yang diberikan terhadap anak sudah tepat atau tidak.

2. Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Judul skripsi ini ditulis oleh Ronggo Brahmono, mahasiswa angkatan 2005 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



Dalam rumusan masalahnya penulis membahas tentang

- Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan?
- Apakah hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan?

Tujuan penelitiannya penulis membahas yaitu untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencabulan, dan untuk memperoleh data tentang hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.

3. Judul skripsi : Impelementasi UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dalam upaya member perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan. Judul skripsi ini ditulis oleh Honorius Hendra Martono, mahasiswa angkatan 2000 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun rumusan masalah dan tujuan penulisan, penulis menggali lebih jauh tentang implementasi UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan.

Lebih jauh dalam hasil penelitiannya dikatakan bahwa Pengadilan telah mengimplementasikan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun penerapan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak belum mencerminkan perlindungan hukum yang baik. Hal ini dapat dilihat dari

ringannya sanksi yang dijatuhkan sehingga cenderung tidak membawa efek jer kepada pelakunya.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Putusan Pengadilan**

Menurut KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

### **2. Tindak Pidana**

Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan larangan mana yang disertai dengan ancaman sanksi, yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggar tersebut.

### **3. Pencabulan**

Dalam KUHP (Pasal 289) disebutkan “percabulan atau perbuatan cabul adalah kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Kata ‘seseorang’ dalam pasal tersebut bisa diartikan korban laki-laki maupun perempuan.

#### 4. Anak

Pengertian “anak” dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di kandungan. Hal tersebut sama juga dengan pengertian menurut Konvensi Hak Anak (KHA) .

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan penelitian yang dilakukan / berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan lima tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum, sistematisasi hukum, analisis hukum, interpretasi hukum dan menilai hukum positif.

#### 2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum Normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### a. Bahan hukum primer yang berupa:

- 1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2) Undang –Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang- Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

b. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah anak dan pelakunya adalah anak, laporan penelitian, serta surat kabar yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan anak.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan dengan melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang diteliti

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum diatas, selanjutnya dilakukan deskripsi yang disusun secara sistematis meliputi isi maupun struktur hukum positif ini, secara vertikal tidak ada konflik antar perundang-undangan maka sistematisasi hukum yang digunakan adalah penalaran derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Langkah selanjutnya dilakukan sistematisasi secara horizontal, yaitu membandingkan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. khususnya Pasal 287 ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, khususnya Pasal 81 ayat (1). Maka diberlakukan suatu aturan hukum yang sering disebut *lex spesialis derogate legi generalis*, yaitu apabila terjadi pertentangan antara

peraturan yang khusus dengan pertauran yang umum dalam hal yang sama, maka yang khusus mengalahkan hal yang umum.

Dalam penelitian ini, Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.

Penelitian ini menggunakan 3 macam interpretasi, pertama: interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Kedua : interpretasi sistematis yaitu menggunakan titik tolak dari sistem aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum. Ketiga : interpretasi teologis yaitu bahwa setiap interpretasi dasarnya adalah teologis. Dari berbagai pendekatan yang telah dilakukan maka tugas selanjutnya adalah memberikan penilaian terhadap hukum positif dengan mendasarkan penalaran hukum yang mengatur mengenai bagaimana hukum pidana memutuskan suatu perkara pencabulan yang pelaku dan korbanya adalah anak.

Langkah selanjutnya akan dilakukan analisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan maupun pendapat dari para narasumber. Tahapan terakhir adalah membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi atau ketidak sinkronisasian antara bahan hukum tersebut.

Menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan yang bersifat khusus adalah bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, hasil penelitian, maupun pendapat hukum mengenai faktor-faktor terjadinya pencabulan anak dibawah umur yang pelakunya juga anak dibawah umur, serta respon hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencabulan anak oleh anak tersebut.

#### **H. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab Pendahuluan ini penulis akan menulis mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan dari hasil penelitian yaitu berisi Pembahasan tentang Putusan Pengadilan Terhadap tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Anak di Wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berisi sub bab pertama yang menjelaskan Pengertian Putusan Pengadilan, Macam-macam

Putusan Pengadilan, Syarat-syarat dalam Menjatuhkan Putusan, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan. Sub bab kedua memberikan penjelasan tentang Pengertian Pencabulan, Faktor-faktor Anak melakukan Pencabulan, Akibat Pencabulan terhadap Anak Korban Pencabulan. Sub bab ketiga berisi penjelasan tentang Keberadaan Tindak Pidana Pencabulan Anak, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak. Sub bab keempat berisi penjelasan tentang Analisis Kasus

### **BAB III : PENUTUP**

Dalam bab III Penulis akan menulis mengenai Kesimpulan dan Saran mengenai pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan Penulis.